



**KONTRAK KINERJA
NOMOR: 5 / PK / 2018
DIREKTUR EVALUASI PENGELOLAAN
DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2018**

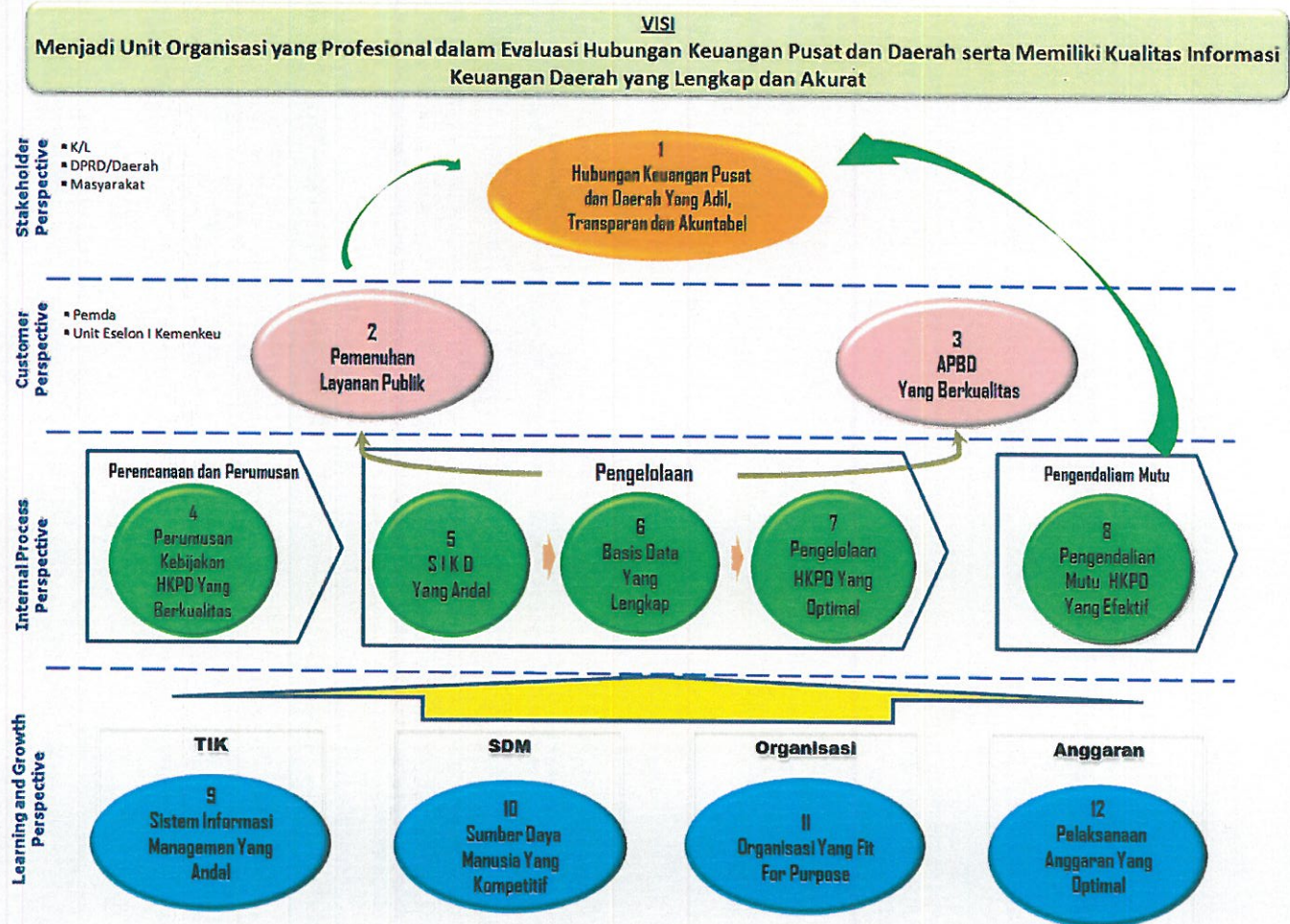
Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Strategi

STRATEGI DIREKTORAT EPIKD 2018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTUR EVALUASI PENGELOLAAN
DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
1.	Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) Yang Adil, Transparan dan Akuntabel	1a- N	Persentase Data Keuangan Daerah dan Data Non Keuangan Daerah Yang Terverifikasi	100%
2.	Pelayanan publik yang prima	2a-N	Persentase Pertukaran Data Melalui Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan (SLDK)	100%
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Yang Berkualitas	3a -CP	Persentase Daerah Yang Memiliki APBD Yang Berkualitas	95%
4.	Perumusan Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) Yang Berkualitas	4a - CP	Persentase Penyelesaian Perumusan Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) Yang Berkualitas	100%
		4b - N	Persentase Penyelesaian Kajian di Bidang Pendanaan di Daerah yang Disetujui oleh Eselon I	100%
5.	Sistem Informasi Keuangan Daerah Yang Andal	5a - CP	Persentase Pengembangan Dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Yang Terintegrasi	100%
6.	Basis Data Yang Lengkap	6a - N	Ketersediaan Data Keuangan Daerah Dan Non Keuangan Daerah Yang Lengkap, Mutakhir, dan Akurat	100%
7.	Pengelolaan Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah (HKPD) Yang Optimal	7a - N	Penyelesaian Kewajiban Hibah Daerah Induk Kepada Daerah Otonom Baru (DOB)	100%
8.	Pengendalian Mutu Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah (HKPD) Yang Efektif	8a - CP	Persentase Pemenuhan Kewajiban Penyampaian APBD	100%
		8b - CP	Persentase Daerah yang Memiliki Kas Wajar	95%
		8c - N	Persentase Rekomendasi Itjen yang Ditindaklanjuti	100%
9.	Sistem Informasi Manajemen Yang Andal	9a - CP	Tingkat Downtime Sistem TIK	0.35%
		9b - CP	Persentase Pengembangan Aplikasi Internal Tepat Waktu	100%
		9c - N	Persentase Pemenuhan Layanan Sesuai Katalog Yang Tepat Waktu	95%

10.	Sumber Daya Manusia Yang Kompetitif SDM	10a - N	Persentase pegawai yang memenuhi Standar Jam Pelatihan (Jamlat)	70%
11.	Organisasi Yang <i>Fit For Purpose</i> OKI	11a-CP	Persentase Implementasi Inisiatif RBTK	94%
		11a - N	Nilai Pemenuhan Kriteria Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	75
12.	Pengelolaan anggaran yang berkualitas GAWI KEU	10a - CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95%

Kegiatan

1. Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah, serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Anggaran

Rp. 3.639.727.000

Jakarta, Januari 2018

Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan,

Direktur Evaluasi Pengelolaan dan
Informasi Keuangan Daerah,



Boediarso Teguh Widodo
NIP. 19580823 198210 1 001



Ria Sartika Azahari
NIP. 19640702 199003 2 001

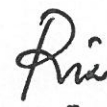
**RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
DIREKTUR EVALUASI PENGELOLAAN
DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2018**

0

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1.	Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Yang Adil, Transparan dan Akuntabel							
1a - N	Persentase Data Keuangan Daerah dan Data Non Keuangan Daerah Yang Terverifikasi	10%	20%	20%	40%	40%	100%	100%
2.	Pelayanan publik yang prima							
2a - N	Persentase Pertukaran Data Melalui Layanan Kementerian Keuangan (SLDK) Sistem Data	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Yang Berkualitas							
3a - CP	Persentase Daerah Yang Memiliki APBD Berkualitas Yang	-	-	-	-	-	95%	95%
4.	Perumusan Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) Yang Berkualitas							
4a - CP	Persentase Penyelesaian Perumusan Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) Yang Berkualitas	-	-	-	-	-	100%	100%
4b - N	Persentase Penyelesaian Kajian di Bidang Pendanaan di Daerah yang Disetujui oleh Eselon I	-	-	-	-	-	100%	100%

10.	Sumber Daya Manusia Yang Kompetitif							
10a - N	Persentase Pegawai Yang Memenuhi Standar Jamlat	-	25%	25%	-	25%	70%	70%
11.	Organisasi Yang <i>Fit For Purpose</i>							
11a - CP	Persentase Implementasi Inisiatif RBTK	6%	25%	25%	34%	34%	94%	94%
11b - N	Nilai Pemenuhan Kriteria Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi	-	-	-	-	-	75	75
12.	Pengelolaan anggaran yang berkualitas							
12a - CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	7%	25%	25%	65%	65%	95%	95%

Jakarta, Januari 2018
PNS yang dinilai,



Ria Sartika Azahari
NIP. 196407021990032001

Sasaran Kerja Pegawai

I. PEJABAT PENILAI			II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI		
No			No		
1	Nama	Boediarso Teguh Widodo	1	Nama	Ria Sartika Azahari
2	NIP	195808231982101001	2	NIP	196407021990032001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama/ IVE	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Muda / IVc
4	Jabatan	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan	4	Jabatan	Direktur Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah
5	Unit Kerja	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	5	Unit Kerja	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS /OUTPUT	KUALITAS /MUTU	WAKTU	BIAYA
1.	Menyediakan Data Keuangan Daerah dan Data Non Keuangan Daerah Yang Terverifikasi	-	100%	100	12 bln	-
2.	Menyediakan Data Melalui Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan (SLDK)	-	100%	100	12 bln	-
3.	Mewujudkan Daerah yang Memiliki APBD Yang Berkualitas	-	95%	100	12 bln	-
4.	Menyelesaikan Perumusan Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) Yang Berkualitas	-	100%	100	12 bln	-
5.	Menyelesaikan Kajian di Bidang Pendanaan di Daerah yang Disetujui oleh Eselon I	-	100%	100	12 bln	-
6.	Melaksanakan Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Yang Terintegrasi	-	100%	100	12 bln	-

7.	Tersedianya Data Keuangan Daerah dan Non Keuangan Daerah Yang Lengkap, Mutakhir, dan Akurat	-	100%	100	12 bln	-
8.	Penyelesaian Kewajiban Hibah Daerah Induk Kepada Daerah Otonom Baru (DOB)	-	100%	100	12 bln	-
9.	Mewujudkan Kewajiban Penyampaian APBD	-	100%	100	12 bln	-
10.	Mewujudkan Daerah Memiliki Kas Wajar	-	95%	100	12 bln	-
11.	Melaksanakan Rekomendasi Itjen yang Ditindaklanjuti	-	100%	100	12 bln	-
12.	Mewujudkan Downtime Sistem TIK	-	0.35%	100	12 bln	-
13.	Mengembangkan Aplikasi Internal Tepat Waktu	-	100%	100	12 bln	-
14.	Mewujudkan Layanan Sesuai Katalog Yang Tepat Waktu	-	95%	100	12 bln	-
15.	Mewujudkan Pegawai Yang Memenuhi Standar Jamlat	-	70%	100	12 bln	-
16.	Mewujudkan Implementasi Inisiatif RBTK	-	94%	100	12 bln	-
17.	Memenuhi Nilai Kriteria Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi	-	75	100	12 bln	-
18.	Mewujudkan kualitas Pelaksanaan Anggaran	-	95%	100	12 bln	-

Pejabat Penilai,



Boediarso Teguh Widodo
NIP. 195808231982101001

Jakarta, Januari 2018
PNS yang dinilai,



Ria Sartika Azahari
NIP. 19640702 199003 2 001